

# RENJA

## 2023

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng - Rangas - Mamuju 91512  
email : [satpolpp@sulbarprov.go.id](mailto:satpolpp@sulbarprov.go.id) , Website :<http://www.satpolpp.sulbarprov.go.id/>

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 4000 / 469 / PP / VI / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi Sulawesi barat Tahun 2023 agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyusun Rencan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Provinsi Sulawesi Barat Tafun2023;
  - b. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Tahun 2023 -2026 yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Satrtan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam Kebaran Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengelolaan dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53);
  8. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 20(D Nomor 6' Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);**
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
- KESATU : Tim Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai rencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud Pertanggung Jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah Di samping itu juga merupakan tolak ukur dalam menilai pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sesuai Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi);
- KEDUA : Ruang Lingkup Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kesekretariatan, Bidang Tributanmas, Bidang Linmas, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang Penegakan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Rancangan Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat;
- KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat disusun sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN ;  
BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021 ;  
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ;  
BAB IV PENUTUP ;
- KELIMA : Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut pada poin KEEMPAT terdapat dalam naskah lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan;



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho - Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan Rancangan akhir RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2023. Selain itu dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Mamuju, 25 Juni 2022

**KEPALA SATUAN**

BUJAERAMY HASSAN, SH.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV c

NIP. 19750630 200212 1 010

## DAFTAR ISI

SK PENETAPAN RENJA.....	1
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B Maksud dan Tujuan .....	2
C Landasan Hukum .....	3
D. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2022 .....</b>	<b>5</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra.....	5
1. Capaian Program / Kegiatan Tahun 2022.....	5
2. Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022 .....	13
B. Analisis Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	21
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	21
2. Indikator Kinerja Utama .....	23
C. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	25
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	25
2. Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	26
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN .....</b>	<b>27</b>
A. Telaahan Kebijakan Nasional .....	27
1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	27
2 Prioritas Pembangunan Nasional.....	29
3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat / RKPD 2023 .....	30
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP dan Damkar.....	32
1. Tujuan Jangka Menengah Rencana Kerja .....	32
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
C. PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP DAN DAMKAR.....	35
Rencana Awal (Ranwal).....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan per 31 Desember Tahun 2022 .....	6
TABEL 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Tahun 2021 .....	14
TABEL 3 Gambaran Pelayanan Pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Dalam Lima (5) Tahun Terakhir .....	24
TABEL 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
TABEL 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPD .....	26
TABEL 6 Standar Pelayanan Minimal Satpol PP dan Damkar .....	28
TABEL 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renja .....	32
TABEL 8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	33



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Gov ernonce) menjadi hal yang penting Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Gov ernonce) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diberikan kewenangan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan wewenang dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tetang Otonomi Daerah pada pasal. 13 dan 14 huruf (c) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pasal 148 dan 149 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja mendapat posisi dan peranan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah saat ini Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka " Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur " Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka perlu kiranya di tindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja bidang Ketentraman dan Ketertiban yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 tahun, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan Satpol PP & Damkar Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2023 s.d 2026, yang memuat Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis yang menjabarkan Kebijakan dan Program kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja Satpol PP merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan furgsi Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat.

## B Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Memberikan arah pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders)

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (RENJA PD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. RENJA Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut.

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. RENJA PD tahun 2023 merupakan acuan SKPD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2023;
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam RENJA PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrebang;

4. Program dan kegiatan dalam RENJA PD harus selaras dengan program dan kegiatan RENSTRA Tahun 2023 - 2026;
5. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju

Rencana Kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 -2026. Rencana Kerja tahun anggaran 2023 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 sampai dengan membuat rencana antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan berbagai aspek dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023

### C Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.

### D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan renja dibagi menjadi empat (4) BAB dengan rincian pembahasan sebagai berikut

BAB I	:	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud Tujuan D. Sistematika Penulisan
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2021 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Capaian Program / Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024 B. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol pp 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Indikator Kinerja C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol pp D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional B. Tujuan dan sasaran Renja satpol pp C. Program dan Kegiatan
BAB IV	:	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2022**

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

**M**erujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi.

Pada tahun anggaran 2022, Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kinerja yang telah ditetapkan meskipun dipertengahan pelaksanaan tahun anggaran sampai melakukan refocusing anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi corona virus (covid 19). Kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran program/kegiatan. Hasil Renja secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023.

##### 1. Capaian Program / Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat menerima anggaran sebesar **Rp. 16.082.515.311** (Enam Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan **3 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan**. Dari jumlah Dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 15.056.250.150** (Lima Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan Capaian kinerja Fisik sebesar **100%** dan Capaian kinerja Keuangan sebesar **97.17%**. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2022**

NO	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU	BOBOT KEGIATAN (Pagu Keg. Dibagi Total Pagu x 100)	REALISASI				
				FISIK (RIEL)		KEUANGAN (SPJ Yg telah di INPUT)		
				PENILAIAN SKPD (%)	TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik)	(Rp.)	(%)	TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik)
1	2	3	4	5	6	7		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.082.515.311	100.00	100%	100.00	15.626.658.380	97.17%	97.17
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.495.902.483	96.35	100%	96.35	15.056.250.150	97.16%	93.62
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.266530	2.80	100%	2.80	152.774.100	99.03%	2.77
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.869.800	1.29	100%	1,29	69.585.500	98.19%	1.26

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.410.900	0.52	100%	0.52	28.400.900	99.96%	0.52
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.553.200	0.17	100%	0.17	27.490.200	99.77%	0.17
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.830.000	0.03	100%	0.03	4.800.800	99.40%	0.03
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.766.630	0.02	100%	0.02	3.766.500	100%	0.02
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000	0.06	100%	0.06	9.439.800	99.37%	0.06
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.336.000	0.17	100%	0.17	9.290.400	99.51%	0.17
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.187.726.931</b>	<b>81.99</b>	<b>100%</b>	<b>81.99</b>	<b>13.047.306.646</b>	<b>98.95%</b>	<b>81.13</b>

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.568.009.609	65.71	100%	65.71	10.444.216.671	98.83%	65.71
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.531.916.000	45.91	100%	45.91	2.518.542.625	99.47%	45.67
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.681.000	0.07	100%	0.07	11.644.000	99.68%	0.07
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	62.095.522	1.13	100%	1.13	60.928.350	98.12%	1.10
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.024.800	0.22	100%	0.22	11.975.000	99.59%	0.22
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>759.675.225</b>	<b>13.78</b>	<b>100%</b>	<b>13.78</b>	<b>757.812.090</b>	<b>99.75%</b>	<b>13.74</b>
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	194.402.225	3.53	100%	3.53	192.540.990	99.04%	13.74



14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	565.273.000	10.25	100%	10.25	565.271.100	100%	10.25
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	589.328.985	<b>10.69</b>	100%	<b>10.69</b>	<b>588.948.145</b>	99.94%	<b>10.68</b>
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.951.200	2.79	100%	2.79	153.936.400	99.99%	2.79
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.350.000	0.19	100%	0.19	10.341.000	99.91%	0.19
17	Penyediaan Bahan/Material	61.581.385	1.12	100%	1.12	61.581.180	100%	1.12
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.446.400	6.59	100%	6.59	363.089.565	99.90%	6.58
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	229.204.812	<b>4.16</b>	100%	<b>4.16</b>	223.930.148	97.70%	<b>4.06</b>

19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.030.000	0.13	100%	0.13	7.022.000	99.89%	0.13
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.474.912	0.49	100%	0.49	74.950.148	95.51%	0.47
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.699.900	0.89	100%	0.89	141.958.000	98.79%	0.88
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	577.700.000	<b>10.48</b>	100%	<b>10.48</b>	<b>285.479.021</b>	49.42%	<b>5.18</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	552.700.000	10.02	100%	10.02	260.483.021	47.13%	4.72
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0.45	100%	0.45	24.996.000	99.98%	0.45
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	444.660.423	<b>8.06</b>	100%	<b>8.06</b>	<b>434.899485</b>	97.80%	<b>7.89</b>

7	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	315.279.666	5.72	100%	5.72	305.741.780	96.97%	5.54
24	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	134.212.680	2.43	100%	2.43	130.323.500	97.10%	2.36
25	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	41.071.026	0.74	100%	0.74	41.024.600	99.89%	0.74
26	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.995.960	2.45	100%	2.44	134.393.680	99.55%	2.44
27	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	5.000.000	0.09	100%	0.09	0.00	0%	0
8	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	129.380.757	2.35	100%	2.35	129.157.705	99.83%	2.34
28	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.000.000	28,18	100%	28.18	39.819.970	99.55%	28.05

29	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	89.380.757	1.62	100%	1.62	89.337.735	99.95%	1.62
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	141.952.405	<b>2.57</b>	<b>100%</b>	<b>2.57</b>	<b>135.508.745</b>	<b>95.46%</b>	<b>2.46</b>
<b>9</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	141.952.405	<b>2.57</b>	<b>100%</b>	<b>2.57</b>	<b>135.508.745</b>	<b>95.46%</b>	<b>2.46</b>
30	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	141.952.405	2.57	100%	2.57	135.508.745	95.46%	2.46
<b>Jumlah Pagu</b>		<b>16.082.515.311</b>	<b>100.00</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>15.626.658.380</b>	<b>97.17%</b>	<b>97.17</b>

## 2. Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada Tahun 2022, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2022 berdasarkan pada outcome setiap program dan kegiatan sebagai berikut

**TABEL 2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Tahun 2022**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-1)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Realisasi capaian target program /kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Bidang Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100%	
	Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100%	100%	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4	4	100%	4	4	100%	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	2	2	100%	2	2	100%	Sekretariat
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4	4	100%	4	4	100%	Sekretariat
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretariat
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	135	135	100%	135	135	100%	Sekretariat
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	195	195	100%	195	195	100%	Sekretariat

						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	0	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat	
						Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100%	0	0	2	2	100%	2	2	100%	Sekretariat	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	0	0	12	12	100%	12	12	100%	Sekretariat	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	100%	Sekretariat
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%			4	4	100%	4	4	100%	Sekretariat	



					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%	115	115	100%	115	115	100%	Sekretariat
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	99%	Sekretariat
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	3	3	100%	3	3	100%	Sekretariat
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	3	3	100%	3	3	100%	Sekretariat
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	0	0	3	3	100%	3	3	100%	Sekretariat
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	3	3	100%	3	3	100%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	Sekretariat

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	0	0	5	5	100%	5	5	100%	Sekretariat
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	18	18	100%	18	18	100%	Sekretariat
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%			1	1	100%	1	1	100%	Sekretariat
				2	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi</b>	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	TIBUNTRANMAS
					Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang di Tangani	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	TIBUNTRANMAS

					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100%	100%	100%	10	10	100%	10	10	100%	TIBUNTRANMAS
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100%	100%	100%	6	6	100%	6	6	100%	TIBUNTRANMAS
					Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100%	0	67.91	0	0	0	0	0	0	TIBUNTRANMAS
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100%	100%	100%	50	50	100%	50	50	100%	TIBUNTRANMAS
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten yang Aktif Melakukan dan Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	Linmas
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	2	2	100%	2	2	100%	Linmas

					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	PPUD
					Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	100%	100%	30	30	100%	30	30	100%	PPUD
					Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	100%	99.86%	0	0	0	0	0	0	PPUD
					Penanganan atas pelanggaran PERDA dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	100%	100%	100%	2	2	100%	2	2	100%	PPUD
				3	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	100	100%	100	100	100%	DAMKAR
					Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	100	100%	100	<b>100</b>	<b>100%</b>	DAMKAR
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100	0	60	60	100%	60	60	100%	DAMKAR

## B. Analisis Pelayanan Satpol PP dan Damkar

### 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

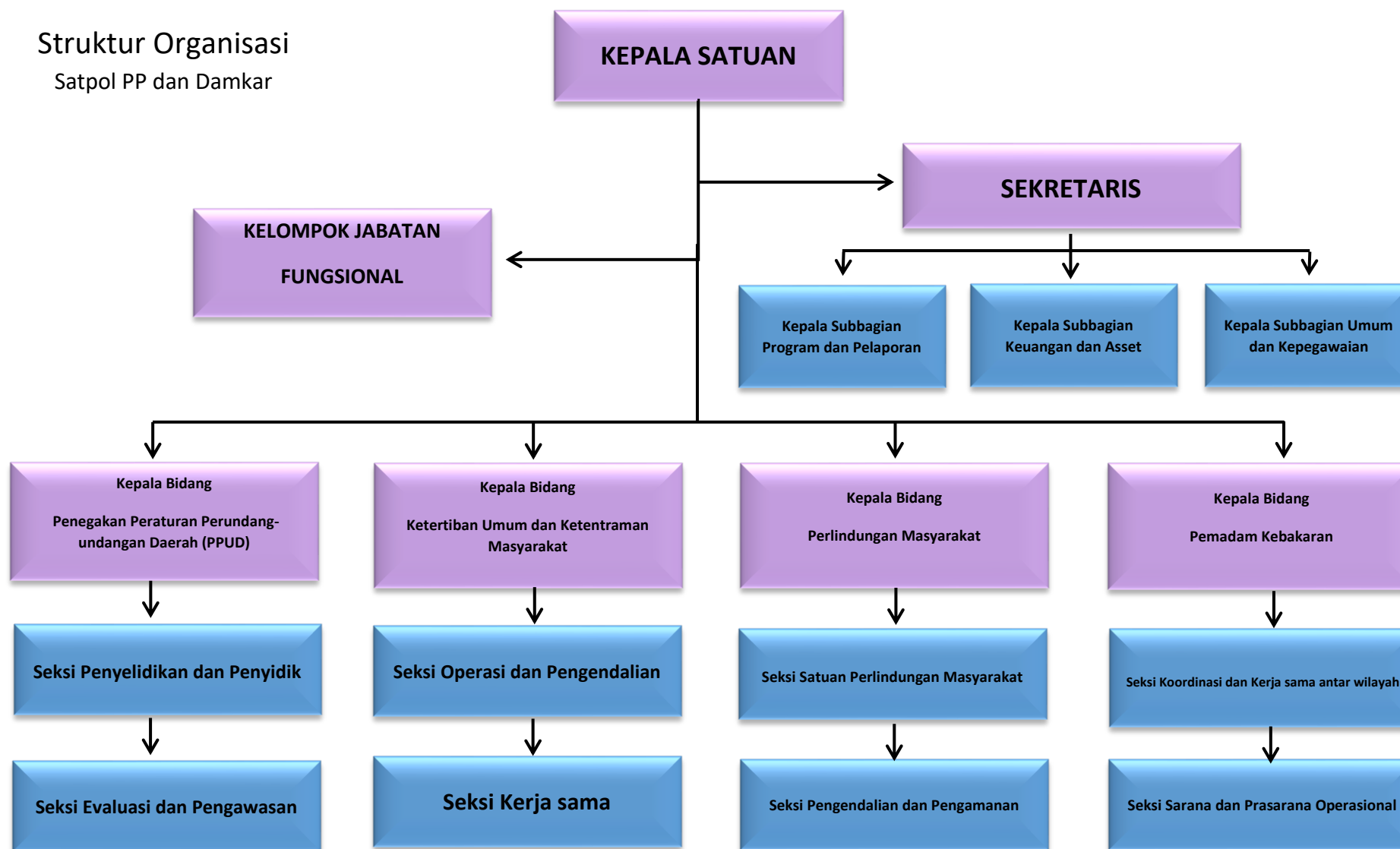
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dibentuk melalui peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur

## Struktur Organisasi

Satpol PP dan Damkar



## 2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

	NILAI	PREDIKAT
<b>A</b>	85 % - 100 %	Sangat Berhasil
<b>B</b>	70 % - < 85 %	Berhasil
<b>C</b>	55 % - < 70 %	Cukup Berhasil
<b>D</b>	< 55 %	Tidak Berhasil

**TABEL 3**  
**Gambaran Pelayanan Pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat**  
**Dalam Lima (5) Tahun Terakhir**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFINISI	PEMILIK	Capaian				
						2018	2019	2020	2021	2022 Tahun Berjalan
1	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya tertib dan tentram	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam mengurangi angka kriminalitas yang berbudaya tertib dan tentram	Bidang TIBUNTRANMAS	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda dan pergub yang memuat sanksi yang di tegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan pergub Yang memuat sanksi}} \times 100$	Penertiban perda/perkada yang berbadan hukum, pelaku usaha dan masyarakat dalam menciptakan budaya tertib dan tentram	Bidang PPUD	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokumen Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman \& Evakuasi Korban kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kab / kota Tahun x}} \times 100$	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap	Bidang Damkar	100%	100%	100%	100%	100%



### C. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

#### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, Adapun permasalahan-permasalahan pokok dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 4  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	1 Belum Optimalnya Penegakan PERDA /PERKADA Serta Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Kurangnya peningkatan SDM
			2 Terbatasnya Personil PPNS
			3 Kurangnya sosialisasi PERDA/ PERKADA
			4 Minimnya sarana dan prasarana pendukung
2	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1 Belum adanya pemetaan rawan bencana kebakaran	1 Belum adanya pemetaan rawan bencana kebakaran

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, Terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut

Tabel 5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPD

No	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum Optimalnya Penegakan PERDA /PERKADA Serta Urusan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rendahnya pengetahuan Satpol PP dalam meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban Umum	Perlunya Peningkatan SDM Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan, ketentraman dan ketertiban Umum
		Terbatasnya Personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sehingga dalam Penegakan Perda/Perkada belum Maksimal	Perlunya penambahan personil PPNS yang kompeten yang telah mengikuti Diklat PPNS
		Kurangnya sosialisasi PERDA/ PERKADA	Meningkatkan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Masih Kurang Sarana dan Prasaran dalam mendukung pelaksanaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Perlunya Penambahan Sarana dan Prasaran dalam mendukung pelaksanaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum
2	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Belum ada Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Perlu Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

## 2. Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan telaah diatas, Maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merumuskan Isu-isu Strategis guna mendukung agenda Utama Pembangunan Daerah, yaitu

- Kurangnya DIKLAT/BIMTEK peningkatan kapasitas SDM sehingga minimnya kemampuan personil Satpol PP dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengoptimalkan peningkatan penegakan PERDA/PERKADA dengan penambahan personil PPNS yang kompeten
- Adanya upaya dalam penambahan anggaran guna melaksanakan sosialisasi kemasyarakatan
- Adanya upaya dalam penambahan sarana dan prasarana pendukung
- Mewujudkan pemetaan rawan bencana kebakaran

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN**

#### A. Telaahan Kebijakan Nasional

##### 1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang memuat pengaturan terkait jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan SPM di daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 202 tentang penerapan standar pelayanan minimal sebagai pengganti dari permendagri 100 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Adapun urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN
1	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan pendidikan menengah</li> <li>▪ Pelayanan pendidikan khusus</li> </ul>
2	KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi</li> <li>▪ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi</li> </ul>
3	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>▪ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>
4	PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi</li> <li>▪ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</li> </ul>
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>▪ Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>▪ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</li> <li>▪ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Korban kebakaran</li> </ul>
6	SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti</li> <li>▪ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti</li> <li>▪ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti</li> <li>▪ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti</li> </ul>

Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM yang telah ditetapkan. Dengan adanya SPM harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar ataupun pelayanan publik yang sama di setiap daerah akan dapat diwujudkan.

Untuk mendukung keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL 6

Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standarisasi tenaga Satpol PP</li> <li>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengangkatan PPNS Penegakan Perda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> <li>Penegakan Perda dan Pergub.</li> <li>Pembinaan PPNS Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kab/kota.</li> <li>Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Pembinaan PPNS Kab/Kota</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standarisasi Saprasmadam kebakaran</li> <li>Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam dan kebakaran</li> <li>Penyelenggaraan sistem informasi kebakaram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Inspeksi Peralatan proteksi kebakaran</li> <li>Investigasi kejadian kebakaran</li> </ul>

## 2 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai Berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- g. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Dalam memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik, Negara wajib terus hadir dalam *“melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.”* Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

NO	ARAH TATA KELOLA
1	• reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
2	• meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil
3	• memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
4	• mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
5	• mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

### 3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat / RKPD 2023

Adapun arah kebijakan prioritas dari Rancangan akhir RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut, yaitu :

#### PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



#### PRIORITAS I

#### MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

##### ARAH KEBIJAKAN

##### 1 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH SEKTOR UNGGULAN

-  Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan.
-  Penguatan rantai pasok (*Supply Chain*) dan penguatan kelembagaan usaha pertanian, perkebunan dan kelautan.
-  Revitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan.
-  Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan ketersediaan Pangan Daerah.
-  Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM.
-  Meningkatkan Kerjasama dan Jaringan Pemasaran serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.
-  Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi.

##### 2 PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN IKLIM INVESTASI

-  Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha.
-  Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu
-  Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi
-  Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing.
-  Penguatan Vokasi dalam Kerangka *link and match* dengan Dunia Usaha dan Industri
-  Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja.
-  Peningkatan iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

##### 3 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING

-  Pengembangan Destinasi Wisata melalui Perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi).
-  Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
-  Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisata
-  Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-  Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi
-  Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI)

**PRIORITAS II**
**MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA**
**ARAH KEBIJAKAN**
**1 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**


Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.



Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan



Peningkatan Partisipasi Sekolah



Penguatan Literasi Sekolah

**2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS KESEHATAN**


Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Kesehatan.



Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan.



Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam menekan AKI dan AKB.



Pencegahan dan pengendalian penyakit.



Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.



Intensifikasi Pelaksanaan Germas.

**3 PENGUATAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK PENANGANAN STUNTING**


Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat



Penurunan Angka Perkawinan Anak



Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting



Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.



Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak



Peningkatan Akses terhadap air bersih yang layak

**PRIORITAS III**
**MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA**
**ARAH KEBIJAKAN**
**1 PENINGKATAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM**


Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)



Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan, Pesisir dan Laut.



Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah.



Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari.



Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan.

**2 PENINGKATAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**


Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana.



Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana.



Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana.



Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana.

**PRIORITAS IV**

**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA**

**ARAH KEBIJAKAN**

**1 Penguatan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**



Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja dan Data.



Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan.

**2 Penguatan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing**



Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik



Penguatan Sistem Pelayanan Prima yang terpadu dan Terintegrasi



Pengembangan dan penerapan Inovasi Pelayanan Publik



Peningkatan pengawasan dan manajemen pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik.

**B. Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP dan Damkar**

**1. Tujuan Jangka Menengah Rencana Kerja**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 4 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi pamong Praja dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 7  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target Kinerja Tujuan/Sasaran 4 Tahun			
			Tujuan	Sasaran	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Situasi Memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan Kegiatannya dengan Kondisi yang Aman, tentram dan Tertib	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram.	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%



	berdasarkan Kewenangannya dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada		Provinsi	Provinsi				
2	Mewujudkan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Pemetaan Rawan Kebaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan dalam rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, Damkar Provinsi Sulawesi barat tahun 2023-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4 (Empat) tahun kedepan.

Tabel 8  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

TAGGING DENGAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	
T.4	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA
SS.10	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
SS.11	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel
SS.12	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kapasitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Barat	Meningkatkan Pengelolaan Organisasi yang Kapabel dan Akuntabel Lingkup SKPD	Penerapan Transformasi Budaya Kerja dan Perilaku Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Nilai SAKIP OPD</li> <li>Peningkatan tertib administrasi perkantoran</li> <li>Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN</li> </ul>

<p>Mewujudkan Situasi Memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan Kegiatannya dengan Kondisi yang Aman, tentram dan Tertib berdasarkan Kewenangannya dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada</p>	<p>Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan SOP</li> <li>• Sarana dan prasarana</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Standar Pelayanan yang terkena Dampak</li> <li>• Mendorong Pemenuhan SPM sektoral Kabupaten</li> </ul>
<p>Mewujudkan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p>	<p>Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p>	<p>Mendorong Pemenuhan SPM Kabupaten pada Sub Bidang Pemadam Kebakaran melalui Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM Pemadam Kabupaten</li> <li>• Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana</li> <li>• Penyusunan Peta Rawan Kebakaran dan Response Time rate wilayah manajemen kebakaran (WMK)</li> </ul>

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP DAN DAMKAR

Rencana Awal (Ranwal)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Satpol PP & Damkar	Persen	100		Pendapatan Daerah			
		Nilai SAKIP Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Poin	100		Pendapatan Daerah			
		Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Skala Likert (1-5)	100		Pendapatan Daerah			
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Persen	100		Pendapatan Daerah			
		Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Kategori	100		Pendapatan Daerah			
	1.01	Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP & Damkar	Poin	100	650.000.000	Pendapatan Daerah		100	650.000.000
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Poin	100					
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Poin	100					
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Poin	100					

					Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Poin	100					
					Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Persen	100					
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	4	150.000.000	Pendapatan Daerah		4	150.000.000
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70.000.000	Pendapatan Daerah		1	70.000.000
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70.000.000	Pendapatan Daerah		1	70.000.000
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70.000.000	Pendapatan Daerah		1	70.000.000
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70.000.000	Pendapatan Daerah		1	70.000.000
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	2	150.000.000	Pendapatan Daerah		2	150.000.000
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	2	70.000.000	Pendapatan Daerah		2	70.000.000

		1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu	Satpol PP & Damkar	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>16,800,000,000</b>	Pendapatan Daerah		<b>100</b>	<b>16,800,000,000</b>
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP & Damkar	Orang	135	13,000,000,000	Pendapatan Daerah		150	13,000,000,000
			02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP & Damkar	Dokumen	195	3,500,000,000	Pendapatan Daerah		195	3,500,000,000
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
		1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	Pendapatan Daerah		<b>100</b>	<b>350,000,000</b>

			01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
		1.04		Adminiatrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Satpol PP & Damkar	Persen	100	350.000.000	Pendapatan Daerah		<b>100</b>	350.000.000
			01	Perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000

			02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan/atau Media Sosialisasi Kebijakan Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Jenis	2	50.000.000	Pendapatan Daerah		2	50.000.000
			04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000
			05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000
			06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Data	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000
			07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	50.000.000
	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Satpol PP & Damkar	Persen	100	1.410.000.000	Pendapatan Daerah		100	1.410.000.000
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol PP & Damkar	Unit	2	50,000,000	Pendapatan Daerah		2	50,000,000
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP & Damkar	Paket	353	270,000,000	Pendapatan Daerah		353	270,000,000

			03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP & Damkar	Dokumen	4	70,000,000	Pendapatan Daerah		4	70,000,000
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70,000,000	Pendapatan Daerah		1	70,000,000
			06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	Satpol PP & Damkar	Persen	100		Pendapatan Daerah			
			07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya	Satpol PP & Damkar	Persen	100		Pendapatan Daerah			
			08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas	Satpol PP & Damkar	Persen	100		Pendapatan Daerah			
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP & Damkar	Orang	70	500,000,000	Pendapatan Daerah		70	500,000,000
			10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP & Damkar	Orang	100	100,000,000	Pendapatan Daerah		100	100,000,000
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP & Damkar	Orang	100	300,000,000	Pendapatan Daerah		100	300,000,000



		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	Satpol PP & Damkar	Persen	100	1.400.000.000	Pendapatan Daerah		100	1.350.000.000
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	100,000,000	Pendapatan Daerah		1	100,000,000
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	-	Pendapatan Daerah		1	-
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	100,000,000	Pendapatan Daerah		1	100,000,000
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	5	50,000,000	Pendapatan Daerah		5	50,000,000
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	70,000,000	Pendapatan Daerah		1	70,000,000
		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	80,000,000	Pendapatan Daerah		1	80,000,000
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Satpol PP & Damkar	Persen	100	50.000.000	Pendapatan Daerah		1	35.000.000

			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	600,000,000	Pendapatan Daerah		1	600,000,000
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	50,000,000	Pendapatan Daerah		1	50,000,000
		1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Satpol PP & Damkar	Persen	100	5,100,000,000	Pendapatan Daerah		100	5,100,000,000
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	650,000,000	Pendapatan Daerah		1	650,000,000
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	4	650,000,000	Pendapatan Daerah		4	650,000,000
			03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	700,000,000	Pendapatan Daerah		1	700,000,000
			04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1		Pendapatan Daerah		1	
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Paket	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000

			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	700,000,000	Pendapatan Daerah		1	700,000,000
			08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1		Pendapatan Daerah		1	
			09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	500,000,000	Pendapatan Daerah		1	500,000,000
			10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Satpol PP & Damkar	Unit	20	700,000,000	Pendapatan Daerah		1	700,000,000
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Unit	20	700,000,000	Pendapatan Daerah		1	700,000,000
		1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP & Damkar	Persen	100	420,000,000	Pendapatan Daerah		<b>100</b>	<b>420,000,000</b>
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	10,000,000	Pendapatan Daerah		1	10,000,000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	160,000,000	Pendapatan Daerah		1	160,000,000
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	100,000,000	Pendapatan Daerah		1	100,000,000

			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	150,000,000	Pendapatan Daerah		1	150,000,000
		1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Satpol PP & Damkar	Persen	100	2,950,000,000	Pendapatan Daerah		100	3,450,000,000
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Satpol PP & Damkar	Unit	20	350,000,000	Pendapatan Daerah		30	350,000,000
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP & Damkar	Unit	20	350,000,000	Pendapatan Daerah		30	350,000,000
			03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Satpol PP & Damkar	Unit	1		Pendapatan Daerah		1	
			04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Satpol PP & Damkar	Unit	1	350,000,000	Pendapatan Daerah		1	350,000,000
			05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Satpol PP & Damkar	Unit	5	200,000,000	Pendapatan Daerah		5	200,000,000

			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP & Damkar	Unit	18	200,000,000	Pendapatan Daerah		18	200,000,000
			07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP & Damkar	Unit	1		Pendapatan Daerah		1	
			08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Satpol PP & Damkar	Unit	1		Pendapatan Daerah		1	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP & Damkar	Unit	1	500,000,000	Pendapatan Daerah		1	500,000,000
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP & Damkar	Unit	1	500,000,000	Pendapatan Daerah		1	500,000,000
			11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP & Damkar	Unit	1	500,000,000	Pendapatan Daerah		1	500,000,000
			12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Satpol PP & Damkar	M2	900		Pendapatan Daerah		900	500,000,000
	2			<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi</b>	Satpol PP & Damkar	Persen	<b>100</b>	<b>4,400,000,000</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>4,400,000,000</b>
		2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang di Tangani	Satpol PP & Damkar	Persen	100	2,400,000,000	Pendapatan Daerah		100	2,400,000,000

			01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP & Damkar	Kasus	25	200,000,000	Pendapatan Daerah		25	200,000,000
			02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP & Damkar	Kasus	20	200,000,000	Pendapatan Daerah		20	200,000,000
			03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	350,000,000	Pendapatan Daerah		1	350,000,000
			04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP & Damkar	Dokumen	3	300,000,000	Pendapatan Daerah		3	300,000,000
			05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP & Damkar	Orang	30	250,000,000	Pendapatan Daerah		30	250,000,000
			06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	200,000,000	Pendapatan Daerah		1	200,000,000

			07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP & Damkar	Unit	1	500,000,000	Pendapatan Daerah		1	500,000,000
			08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	150,000,000	Pendapatan Daerah		1	150,000,000
			09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
		2.02		Penegakan Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Persentase Penegakan PERDA dan PERGUB	Satpol PP & Damkar			1.250.000.000	Pendapatan Daerah			1.250.000.000
			01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	250.000.000	Pendapatan Daerah		1	250.000.000
			02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	500.000.000	Pendapatan Daerah		1	500.000.000
			03	Penanganan atas pelanggaran PERDA dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	500.000.000	Pendapatan Daerah		1	500.000.000

		2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Presentase PPNS yang Dibina	Satpol PP & Damkar			750.000.000	Pendapatan Daerah			750.000.000
			01	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	Satpol PP & Damkar	Orang	5	250.000.000	Pendapatan Daerah		5	250.000.000
			02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Satpol PP & Damkar	Orang	5	500.000.000	Pendapatan Daerah		5	500.000.000
	3			<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten</b>	Satpol PP & Damkar	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>5,750,000,000</b>	Pendapatan Daerah		<b>100</b>	<b>5,750,000,000</b>
		3.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Satpol PP & Damkar	Persen	100	5,750,000,000	Pendapatan Daerah		100	5,750,000,000
			01	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000



			02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Satpol PP & Damkar	Laporan	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP & Damkar	Unit	1	2,500,000,000	Pendapatan Daerah		1	2,500,000,000
			06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000

			08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP & Damkar	Unit	5	250,000,000	Pendapatan Daerah		5	250,000,000
			09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Satpol PP & Damkar	Orang	50	250,000,000	Pendapatan Daerah		50	250,000,000
			10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP & Damkar	Dokumen	60	250,000,000	Pendapatan Daerah		60	250,000,000
			11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Satpol PP & Damkar	Kabupaten /Kota	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Satpol PP & Damkar	Dokumen	1	250,000,000	Pendapatan Daerah		1	250,000,000
			13	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Satpol PP & Damkar	Keluarga	60	250,000,000	Pendapatan Daerah		60	250,000,000

			14	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satpol PP & Damkar			250.000.000				250.000.000
				<b>GRAND TOTAL</b>					<b>39.580.000.000</b>				<b>40.065.000.000</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Ketentraman Ketertiban umum dan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Pemadam Kebakaran Sulawesi Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 4 tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Provinsi Sulawesi Barat juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja tahun 2023 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Terima kasih  
Sub Program & Perencanaan

